



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 12 / 31

NOMOR KLAS. :

A B A I

B / 8

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 010 /A/JA/04/2008

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI
DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN,
KEJAKSAAN NEGERI MAMASA, KEJAKSAAN NEGERI BELOPA, KEJAKSAAN
NEGERI MALILI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI
SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI SANANA, KEJAKSAAN NEGERI WEDA DALAM
DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA, KEJAKSAAN NEGERI
MENTOK, KEJAKSAAN NEGERI MANGGAR DALAM DAERAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEJAKSAAN NEGERI
KEPAHIANG DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU,
KEJAKSAAN NEGERI DOBO DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
MALUKU DAN KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT DALAM DAERAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pada saat ini telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Dobo, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat, perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Rincian Tugas dan wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri

Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Dobo ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Malili dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Dobo dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19 Tahun; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B/761/M.PAN/3/2008 tanggal 24 Maret 2008.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI MAMASA, KEJAKSAAN NEGERI BELOPA, KEJAKSAAN NEGERI MALILI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI SANANA, KEJAKSAAN NEGERI WEDA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA, KEJAKSAAN NEGERI MENTOK, KEJAKSAAN NEGERI MANGGAR, DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI

**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEJAKSAAN NEGERI
KEPAHIANG DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
BENGKULU, KEJAKSAAN NEGERI DOBO DALAM DAERAH
HUKUM KEJAKSAAN TINGGI MALUKU DAN KEJAKSAAN
NEGERI SIMPANG EMPAT DALAM DAERAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT.**

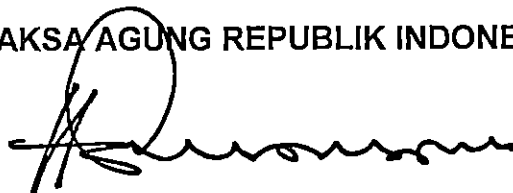
- PERTAMA** : Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai berkedudukan di Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Mamasa berkedudukan di Mamasa meliputi wilayah kabupaten Mamasa, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belopa berkedudukan di Belopa meliputi wilayah kabupaten Luwu, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Malili berkedudukan di Malili meliputi wilayah kabupaten Luwu Timur, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Sanana berkedudukan di Sanana meliputi wilayah kabupaten Kepulauan Sula, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Weda berkedudukan di Weda meliputi wilayah kabupaten Halmahera Tengah, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Mentok berkedudukan di Mentok meliputi wilayah kabupaten Bangka Barat, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Manggar berkedudukan di Manggar meliputi wilayah kabupaten Belitung Timur, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepahiang berkedudukan di Kepahiang meliputi wilayah kabupaten Kepahiang, Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Dobo berkedudukan di Dobo meliputi wilayah kabupaten Kepulauan Aru, dan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Simpang Empat berkedudukan di Simpang Empat meliputi wilayah Kabupaten Pasaman Barat masing-masing sebagai Kejaksaan Negeri tipe B.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Dobo, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 BAB XVII Bagian Ketigabelas sampai dengan Ketujuhbelas Pasal 624 sampai dengan 677 sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
- KETIGA** : Semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksaan Negeri Sekayu di Pangkalan Balai menjadi milik Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Cabang Kejaksaan Negeri Polewali di Mamasa menjadi milik Kejaksaan Negeri Mamasa, Cabang Kejaksaan Negeri Palopo di Belopa menjadi milik Kejaksaan Negeri Belopa, Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Sanana menjadi milik Kejaksaan Negeri Sanana, Cabang Kejaksaan Negeri Soa-siu di Weda menjadi milik Kejaksaan Negeri Weda, Cabang Kejaksaan Negeri Sungailiat di Mentok menjadi milik Kejaksaan

Negeri Mentok, Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan di Manggar menjadi milik Kejaksaan Negeri Manggar dan Cabang Kejaksaan Negeri Saumlaki di Dobo menjadi milik Kejaksaan Negeri Dobo.

- KEEMPAT** : Perubahan status Cabang Kejaksaan Negeri Masamba di Wotu menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Malili di Wotu, nama dan tipe Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Dobo, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Simpang Empat sebagaimana tercantum pada Lampiran I dalam Daftar nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia, sedangkan bagan organisasi tercantum dalam Lampiran II huruf a dan huruf b Peraturan Jaksa Agung ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA** : Sejak berlakunya peraturan ini, di seluruh Indonesia terdapat 31 Kejaksaan Tinggi, 76 Kejaksaan Negeri tipe A, 296 Kejaksaan Negeri tipe B dan 91 Cabang Kejaksaan Negeri.
- KEENAM** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 April 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
 Nomor : PER- 010 /A/JA/04/2008
 Tanggal : 16 April 2008.

**DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN
 CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA**

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH	1	BANDA ACEH	A	1 2	SIGLI DI KOTA BAKTI SIGLI DI MEUREUDU
		2	SABANG	B		
		3	SIGLI	B	3 4	TAPAKTUAN DI BLANGPIDIE TAPAKTUAN DI BAKONGAN
		4	LHOKSEUMAWE	B		
		5	LANGSA	B		
		6	TAKENGON	B		
		7	MEULABOH	B		
		8	TAPAKTUAN	B		
		9	KUTACANE	B		
		10	BIREUEN	B		
		11	LHOKSUKON	B		
		12	IDI	B		
		13	KUALA SIMPANG	B		
		14	SINABANG	B		
		15	CALANG	B		
		16	SINGKEL	B		
		17	BLANGKEJEREN	B		
		18	JANTHOI	B		
II	SUMATERA UTARA DI MEDAN	1	MEDAN	A	1 2	LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI
		2	BINJAI	A		
		3	PEMATANG SIANTAR	A	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG KABANJAHE DI TIGA BINANGA TARUTUNG DI SIBORONG- BORONG PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN PADANG SIDEMPUAN DI GUNUNG TUA GUNUNG SITOLI DI PULAU TELO GUNUNG SITOLI DI TELUK DALAM KISARAN DI LABUHAN RUKU STABAT DI PANGKALAN BRANDAN BALIGE DI PORSEA BALIGE DI PANGURURAN PANYABUNGAN DI KOTANOPAN PANYABUNGAN DI NATAL
		4	SIBOLGA	A		
		5	LUBUK PAKAM	A		
		6	TEBING TINGGI	B		
		7	TANJUNG BALAI	B		
		8	RANTAU PRAPAT	B		
		9	KABANJAHE	B		
		10	SIDIKALANG	B		
		11	TARUTUNG	B		
		12	PADANG SIDEMPUAN	B		
		13	GUNUNGSITOLI	B		
		14	KISARAN	B		
		15	SIANTAR	B		
		16	STABAT	B		
		17	BELAWAN	B		
		18	BALIGE	B		
		19	PANYABUNGAN	B		

1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	PADANG BUKITTINGGI PAYAKUMBUH PARIAMAN SAWAHLUNTO SOLOK PADANG PANJANG BATUSANGKAR LUBUK SIKAPING PAINAN SIJUNJUNG LUBUK BASUNG TUA PEJAT SIMPANG EMPAT	A A B B B B B B B B B B B	1 2 3 4 5 6 7 8	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU PAYAKUMBUH DI SULIKI SOLOK DI MUARA LABUH SOLOK DI ALAHAN PANJANG LUBUK SIKAPING DI TALU PAINAN DI BALAI SELASA SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH LUBUK BASUNG DI MANINJAU
IV	RIAU DI PEKANBARU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	PEKANBARU RENGAT DUMAI BENGKALIS TEMBILAHAN BANGKINANG PASIR PANGARAIAAN SIAK SRI INDRAPURA TELUK KUANTAN PANGKALAN KERINCI UJUNG TANJUNG	A B B B B B B B B B B	1	BENGKALIS DI SELAT PANJANG
V	JAMBI DI JAMBI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JAMBI MUARA BULIAN MUARA BUNGO SUNGAI PENUH BANGKO KUALA TUNGKAL SAROLANGUN MUARA TEBO MUARA SABAK SENGETI	A B B B B B B B B B	1 2	MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI KUALA TUNGKAL DI NIPAH PAJANG
VI	SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	PALEMBANG KAYU AGUNG BATURAJA LAHAT LUBUK LINGGAU MUARA ENIM SEKAYU PRABUMULIH PAGAR ALAM PANGKALAN BALAI	A B B B B B B B B B	1 2 3 4	BATURAJA DI MARTAPURA BATURAJA DI MUARA DUA LAHAT DI TEBING TINGGI MUARA ENIM DI PENDOPO

1	2	3	4	5	6	7
XI	JAWA TENGAH DI SEMARANG	1	SEMARANG	A	1	SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG
		2	SURAKARTA	A		
		3	PEKALONGAN	A		
		4	MAGELANG	A		
		5	PURWOKERTO	A		
		6	TEGAL	A		
		7	PATI	A		
		8	CILACAP	A		
		9	KUDUS	B		
		10	KLATEN	B		
		11	SALATIGA	B		
		12	REMBANG	B		
		13	PEMALANG	B		
		14	PURBALINGGA	B		
		15	PURWOREJO	B		
		16	KEBUMEN	B		
		17	SRAGEN	B		
		18	KENDAL	B		
		19	BLORA	B		
		20	BOYOLALI	B		
		21	BREBES	B		
		22	DEMAK	B		
		23	JEPARA	B		
		24	KARANGANYAR	B		
		25	SUKOHARJO	B		
		26	WONOGIRI	B		
		27	BANJAR NEGARA	B		
		28	TEMANGGUNG	B		
		29	WONOSOBO	B		
		30	BANYUMAS	B		
		31	BATANG	B		
		32	PURWODADI	B		
		33	AMBARAWA	B		
		34	SLAWI	B		
		35	MUNGKID	B		
		36	KAJEN	B		
XII	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA	1	YOGYAKARTA	A		
		2	SLEMAN	A		
		3	WONOSARI	B		
		4	WATES	B		
		5	BANTUL	B		
XIII	JAWA TIMUR DI SURABAYA	1	SURABAYA	A		
		2	MALANG	A		
		3	JEMBER	A		
		4	KEDIRI	A		
		5	MADIUN	A		
		6	PASURUAN	A		
		7	BOJONEGORO	A		
		8	BONDOWOSO	A		
		9	PAMEKASAN	A		
		10	SIDOARJO	A		
		11	KEPANJEN	A		
		12	MOJOKERTO	B		

1	2	3	4	5	6	7
		13	PROBOLINGGO	B		
		14	BANYUWANGI	B		
		15	BLITAR	B		
		16	JOMBANG	B		
		17	PONOROGO	B		
		18	GRESIK	B		
		19	LUMAJANG	B		
		20	TULUNG AGUNG	B		
		21	TRENGGALEK	B		
		22	NGANJUK	B		
		23	MAGETAN	B		
		24	TUBAN	B		
		25	NGAWI	B		
		26	SUMENEP	B		
		27	LAMONGAN	B		
		28	SAMPANG	B		
		29	BANGKALAN	B		
		30	PACITAN	B		
		31	SITUBONDO	B		
		32	BANGIL	B		
		33	KRAKSAAN	B		
		34	TANJUNG PERAK	B		
		35	B A T U	B		
XIV	KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1	PONTIANAK	A		
		2	SINGKAWANG	A	1	SINGKAWANG DI PAMANGKAT
		3	SINTANG	B		
		4	KETAPANG	B		
		5	SANGGAU	B	2	SANGGAU DI ENTIKONG
		6	MEMPAWAH	B		
		7	PUTUSIBAU	B		
		8	SAMBAS	B		
		9	BENGKAYANG	B		
		10	NGABANG	B		
XV	KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA	A		
		2	SAMPIT	B		
		3	KUALA KAPUAS	B	1	KUALA KAPUAS DI PALINGKAU
		4	MUARA TEWEH	B		
		5	PANGKALANBUN	B		
		6	BUNTOK	B		
		7	PURUK CAHU	B		
		8	TAMIANG LAYANG	B		
		9	KASONGAN	B		
		10	KUALA PEMBUANG	B		
		11	SUKAMARA	B		
		12	NANGA BULIK	B		
		13	KUALA KURUN	B		
		14	PULANG PISAU	B		

1	2	3	4	5	6	7
XVI	KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	BANJARMASIN KANDANGAN KOTABARU MARTAPURA AMUNTAI BARABAI TANJUNG RANTAU PLEIHARI MARABAHAN BANJARBARU BATULICIN	A B B B B B B B B B B B		
XVII	KALIMANTAN TIMUR DI BALIKPAPAN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	BALIKPAPAN SAMARINDA TENGGARONG TANAH GROGOT TANJUNG REDEP TARAKAN NUNUKAN BONTANG TANJUNG SELOR SENDAWAR SANGATTA MALINAU PENAJAM	A A A B B B B B B B B B B		
XVIII	SULAWESI UTARA DI MANADO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	MANADO TONDANO KOTAMOBAGU TAHUNA BITUNG TOMOHON AMURANG MELONGUANE AIRMADIDI	A B B B B B B B B	1 2 3 4	KOTAMOBAGU DI BAROKO KOTAMOBAGU DI DOMUGA TAHUNA DI SIAU MELONGUANE DI BEO
XIX	SULAWESI TENGAH DI PALU	1 2 3 4	PALU LUWUK TOLI-TOLI POSO	A B B B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	LUWUK DI BUNTA LUWUK DI PAGIMANA TOLI-TOLI DI LAULALANG TOLI-TOLI DI OGOTUA TOLI-TOLI DI BANGKIR POSO DI AMPANA POSO DI KOLONADALE POSO DI TENTENA POSO DI UNA-UNA WAKAI POSO DI BUNGKU

1	2	3	4	5	6	7
XX	SULAWESI TENGGARA DI KENDARI	5	DONGGALA	B	11	DONGGALA DI SABANG
		6	BANGGAI	B	12	DONGGALA DI TOMPE
		7	PARIGI	B	13	PARIGI DI TINOMBO
		8	BUOL	B	14	PARIGI DI MOUTONG
					15	BUOL DI PALELEH
					16	BUOL DI LOKODIDI
		1	KENDARI	A		
		2	BAU-BAU	B		
		3	KOLAKA	B		
		4	RAHA	B		
		5	UNAAHA	B		
XXI	SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR	1	MAKASSAR	A	1	MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR
		2	PARE-PARE	A		
		3	PALOPO	A		
		4	SUNGGUMINASA	A	2	SUNGGUMINASA DI MALINO
		5	WATAMPONE/BONE	A	3	BONE DI POMPANUA
					4	BONE DI LAPARIAJA
					5	BONE DIKAJUARA
		6	MAMUJU	B		
		7	MAROS	B	6	MAROS DI CAMBA
		8	BANTAENG	B		
		9	PINRANG	B		
		10	SENGKANG	B		
		11	SOPPENG	B		
		12	BARRU	B		
		13	BULUKUMBA	B	7	BALUKUMBA DI KAJANG
		14	JENEPONTO	B		
		15	ENREKANG	B		
		16	MAJENE	B		
		17	MAKALE	B	8	MAKALE DI RANTEPAO
		18	PANGKAJENE	B		
		19	SELAYAR	B		
		20	POLEWALI	B		
		21	SIDENRENGRAPPANG	B		
		22	SINJAI	B		
		23	TAKALAR	B		
		24	MASAMBA	B		
		25	MAMASA	B		
		26	BELOPA	B		
		27	MALILI	B	9	MALILI DI WOTU

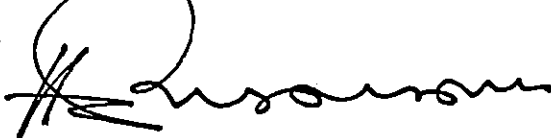
1	2	3	4	5	6	7
XII	BALI DI DENPASAR	1 2 3 4 5 6 7 8	DENPASAR SINGARAJA KLUNGKUNG BANGLI AMLAPURA GIANYAR NEGARA TABANAN	A A B B B B B	1	KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA
XXIII	NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM	1 2 3 4 5 6	MATARAM PRAYA SELONG SUMBAWA BESAR RABA DOMPU	A B B B B B		
XXIV	NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	KUPANG SOE KEFAMENANU ATAMBUA ENDE MAUMERE LARANTUKA RUTENG BAJAWA WAINGAPU WAKABUBAK KALABAH LEWOLEBA BAA	A B B B B B B B B B B B	1 2 3 4	KUPANG DI SEBA (SEBU) LARANTUKA DI WAIWERANG RUTENG DI REO RUTENG DI LABUHAN BAJO
XXV	MALUKU DI AMBON	1 2 3 4 5 6	AMBON MASOHI TUAL SAUMLAKI NAMLEA DOBO	A B B B B B	1 2 3 4 5 6	AMBON DI BANDANAERA AMBON DI SAPARUA MASOHI DI GESER MASOHI DI PIRU MASOHI DI WAHAI TUAL DI WONRELI

1	2	3	4	5	6	7
XXVI	PAPUA DI JAYAPURA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK-FAK MERAUKE WAMENA NABIRE SERUI TIMIKA	A B B B B B B B B B		
XXVII	MALUKU UTARA DI SOFIFI	1 2 3 4 5 6	TERNATE SOASIU TOBELO LABUHA SANANA WEDA	B B B B B B	1 2	TERNATE DI MOROTAI TERNATE DI JAILOLO
XXVIII	BANTEN DI SERANG	1 2 3 4 5	SERANG TANGERANG PANDEGLANG RANGKASBITUNG CILEGON	A A B B B		
XXIX	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG	1 2 3 4 5	PANGKAL PINANG SUNGAILIAT TANJUNG PANDAN MENTOK MANGGAR	A B B B B	1	SUNGAILIAT DI BELINYU
XXX	GORONTALO DI KOTA GORONTALO	1 2 3 4 5	LIMBOTO GORONTALO TILAMUTA SUWAWA MARISA	B B B B B	1	LIMBOTO DI KWANDANG.

1	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1	TANJUNG PINANG	A	1	TANJUNG PINANG DI DABO SINGKEP
		2	B A T A M TANJUNG BALAI KARIMUN	A	2	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		3		B		
		4	R A N A I	B	4	RANAI DI TAREMPA
J U M L A H		76/296		A/B	91	

Melet 2008.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

1	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1	TANJUNG PINANG	A	1	TANJUNG PINANG DI DABO SINGKEP
		2	B A T A M TANJUNG BALAI KARIMUN	A	2	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		3		B		
		4	R A N A I	B	4	RANAI DI TAREMPA
J U M L A H		76/296		A/B	91	

Maret 2008.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



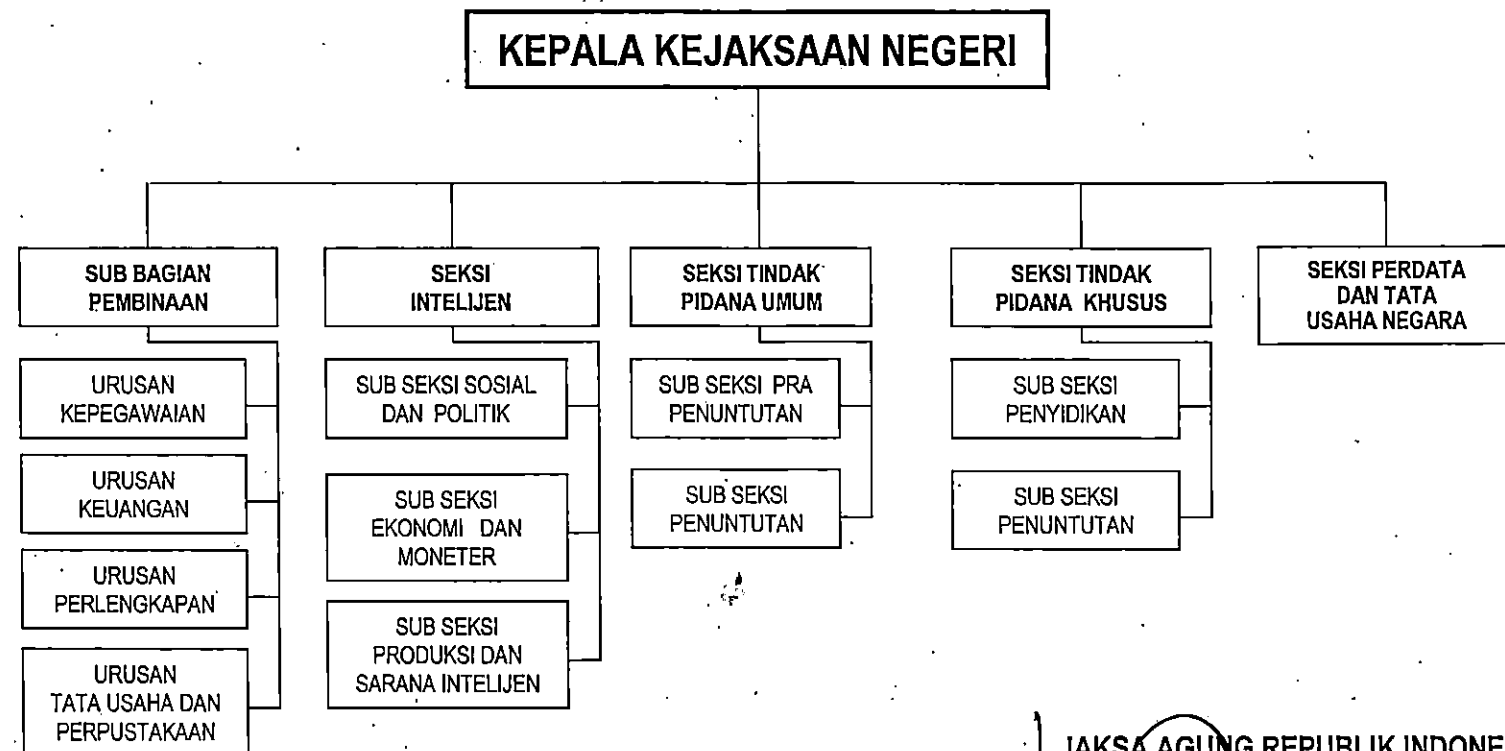
HENDARMAN SUPANDJI

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN
BALAI, KEJAKSAAN NEGERI MAMASA, KEJAKSAAN
NEGERI BELOPA, KEJAKSAAN NEGERI SANANA,
KEJAKSAAN NEGERI WEDA, KEJAKSAAN NEGERI
MENTOK, KEJAKSAAN NEGERI MANGGAR, KEJAKSAAN
NEGERI SIMPANG EMPAT, KEJAKSAAN NEGERI
KEPAHIANG DAN KEJAKSAAN NEGERI DOBO

Lampiran IIa : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

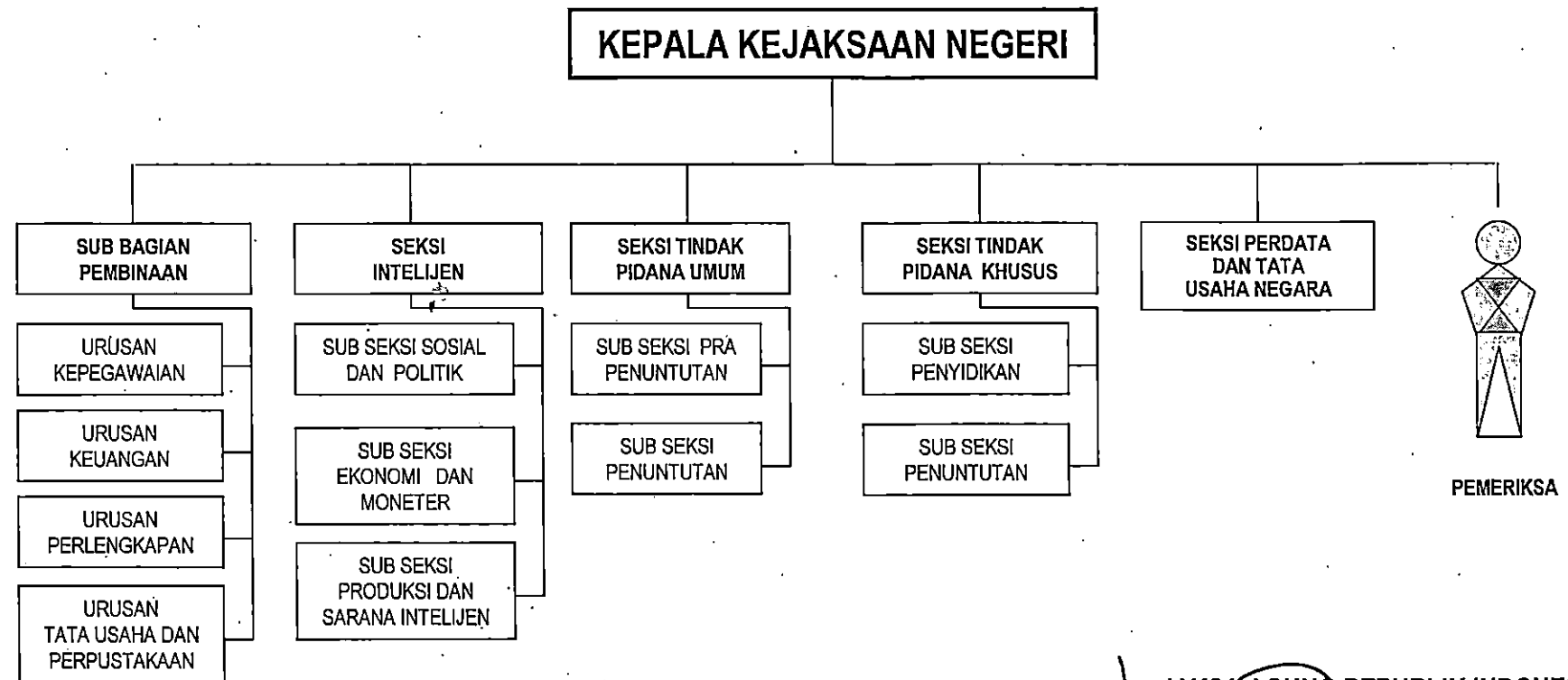
Nomor : PER- 010 /A/JA/04/2008.

Tanggal : 16 April 2008



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI